

AS Putuskan Pelecehan Seksual di Militer sebagai Tindak Pidana

WASHINGTON (IM)- Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani perintah eksekutif pada Rabu (26/1) yang menjadikan pelecehan seksual sebagai kejahatan pidana di bawah undang-undang peradilan militer.

Hal tersebut sebagai upaya untuk meringankan masalah jangka panjang yang selama ini diperjuangkan Pentagon, seperti dilansir Straits Times, Kamis (27/1). Langkah tersebut, yang masuk dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2022, paket anggaran tahunan Pentagon, dibuat untuk memberi penghormatan kepada Vanessa Guillen.

Prajurit militer berusia 20 tahun itu dibunuh oleh seorang rekan prajurit pada 2020 setelah dilecehkan secara seksual. Kemudian keluarga korban yang melaporkan kasus itu tidak memercayai komando militer menindaklanjuti pengaduannya.

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan, perintah itu "menghormati memori Spesialis Angkatan Darat Vanessa Guillen," yang kematiannya "mengalirasi perhatian nasional terhadap momok kekerasan seksual di militer kita dan membantu memajukan reformasi peradilan militer bipartisan."

Biden menandatangani perintah eksekutif pada Rabu (26/1) yang menjadikan pelecehan seksual sebagai kejahatan pidana di bawah undang-undang peradilan militer.

Hal tersebut sebagai upaya untuk meringankan masalah jangka panjang yang selama ini diperjuangkan Pentagon, seperti dilansir Straits Times, Kamis (27/1). Langkah tersebut, yang masuk dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2022, paket anggaran tahunan Pentagon, dibuat untuk memberi penghormatan kepada Vanessa Guillen.

Prajurit militer berusia 20 tahun itu dibunuh oleh seorang rekan prajurit pada 2020 setelah dilecehkan secara seksual. Kemudian keluarga korban yang melaporkan kasus itu tidak memercayai komando militer menindaklanjuti pengaduannya.

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan, perintah itu "menghormati memori Spesialis Angkatan Darat Vanessa Guillen," yang kematiannya "mengalirasi perhatian nasional terhadap momok kekerasan seksual di militer kita dan membantu memajukan reformasi peradilan militer bipartisan."

AS Keluarkan Rekomendasi Peringatan Bisnis dengan Myanmar

WASHINGTON (IM)- Amerika Serikat (AS) mengeluarkan nasihat bisnis untuk Myanmar pada Kamis (27/1). Washington memperingatkan risiko tinggi yang terkait dengan melakukan bisnis di negara itu terutama ketika militer terlibat.

Rekomendasi itu memperingatkan bahwa bisnis harus waspada terhadap risiko keuangan terlarang. Terdapat pula risiko reputasi dan hukum dalam melakukan bisnis dan memanfaatkan rantai pasokan di bawah kendali militer Myanmar. "Kudeta dan pelanggaran berikutnya yang dilakukan oleh militer secara mendasar telah mengubah arah lingkungan ekonomi dan bisnis di Burma," kata rekomendasi itu.

Militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta pada 1 Februari tahun lalu, setelah melengahkan klaim kecurangan dalam pemilihan umum November 2020 yang dimenangkan oleh partai dari Aung San Suu Kyi. Kelompok pemantau pemilu tidak menemukan bukti kecurangan massal tersebut.

Junta telah berperang di berbagai bidang sejak merebut kekuasaan. Militer pun menindak dengan kekuatan mematahkan pada protes sambil mengintensifkan operasi terhadap tentara etnis minoritas dan milisi yang baru dibentuk yang bersekutu dengan pemerintah yang digulingkan.

bersekutu dengan pemerintah yang digulingkan.

"Kembalinya pemerintahan militer di Burma membawa serta korupsi publik tingkat tinggi dan rezim anti pencucian uang yang kurang," kata Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Brian Nelson mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Rekomendasi tersebut mengutip perusahaan milik negara, pertama dan logam mulia, proyek real estat dan konstruksi juga senjata, peralatan militer, serta kegiatan terkait sebagai entitas dan sektor yang menjadi perhatian terbesar di negara itu. Perusahaan-perusahaan itu pun telah diidentifikasi sebagai penyedia sumber daya ekonomi untuk junta.

Perusahaan milik negara, termasuk Myanmar Oil and Gas Enterprise dan Myanmar Timber Enterprise, memainkan peran besar dalam perekonomian negara. Perusahaan itu menghasilkan sekitar setengah dari pendapatan junta. Anjuran itu datang setelah perusahaan minyak Total Energies dan Chevron Corp., mitra dalam proyek gas besar di Myanmar, mengatakan pekan lalu bahwa mereka menarik diri dari negara itu. Penarikan ini dengan alasan situasi kemanusiaan yang memburuk setelah kudeta. ● ans

Lebih dari Separuh Warga Gaza Hidup di Bawah Garis Kemiskinan

GAZA (IM)- Lembaga HAM, Euro-Mediterranean Human Rights Monitor menyebut ada lebih dari setengah dari 2,3 juta penduduk Gaza dilaporkan hidup di bawah garis kemiskinan.

Ini sebagai akibat dari 16 tahun blokade Israel yang diberlakukan di daerah kantong pantai, sebuah kelompok hak asasi yang berbasis di Jenewa. Menurut LSM yang didirikan pembela hak asasi manusia Gaza Ramy Abu itu, ada sekitar 1,5 juta warga Gaza telah menjadi miskin di tengah pengepungan Israel.

Seperti diketahui, pada 2006 Israel memberlakukan pengepungan ilegal di daerah kantong pantai ketika Hamas, sebuah kelompok Islam Palestina, memenangkan pemilihan umum di Wilayah Palestina. Keberhasilan pemilihan mereka mengakibatkan brokrentan dengan saingan dari Fatah, gerakan yang menjalankan pemerintah Palestina (PA).

Israel memperketat blokadnya terhadap Gaza setelah Hamas secara paksa mengambil alih wilayah itu dari Fatah pada 2007. "Kebijakan hukum kolektif Israel terhadap penduduk Gaza masih konsisten, dengan cara yang jelas menunjukkan niat Israel untuk menimbulkan kerugian materi dan moral yang besar pada penduduk Gaza," kata laporan itu.

Dia menambahkan bahwa krisis kemanusiaan di Gaza telah berlipat ganda di tengah blokade. Pada 2005, sebelum pengepungan Israel, tingkat pengangguran sekitar 23,6 persen, sementara pada akhir 2021 mencapai 50,2 persen dan menjadi salah satu tingkat pengangguran tertinggi dunia.

Israel, yang menganggap Hamas sebagai organisasi teroris bersama dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Inggris, melancarkan empat operasi militer skala besar di Jalur Gaza antara 2008 dan 2021. "Serangan Israel menghancurkan puluhan ribu rumah dan industri, menyebabkan runtuhnya fasilitas ekonomi di Jalur Gaza," jelas laporan itu.

Organisasi ini meminta masyarakat internasional untuk menekan Israel agar mengakhiri pengepungan ilegal, mendesak Pengadilan Kriminal Internasional "untuk membuka penyelidikan terhadap para pemimpin dan tentara Israel. Terutama yang terlibat dalam kebijakan hukuman kolektif dan serangan militer terhadap Gaza. ● gul



PEMILIHAN PRESIDEN ITALIA DI ROMA

Presiden Senat Italia Maria Elisabetta Alberti Casellati dan Presiden Dewan Deputi Italia Roberto Fico membersihkan tangan mereka dengan sanitasi tangan di hari ketiga pemungutan suara untuk memilih presiden Italia baru, di Roma, Italia, Rabu (26/1).

PBB Ibaratkan Afghanistan Bergantung di Seutas Benang

PBB mendorong penangguhan aturan yang batasi operasi bantuan penyelamatan nyawa.

NEW YORK (IM) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan (DK) bahwa Afghanistan sedang digantung seutas benang. Dia menyerukan negara-negara untuk mengesahkan semua transaksi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Taliban.

Guterres juga mendorong penangguhan aturan atau kondisi apa pun yang membatasi operasi bantuan penyelamatan nyawa. Dia menyatakan, jutaan orang di negara itu menderita kelaparan ekstrem, pendidikan dan layanan sosial berada di ambang kehancuran, serta kurangnya

likuiditas membatasi kapasitas PBB dan kelompok bantuan untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan.

"Kami perlu memberikan jaminan hukum kepada lembaga keuangan dan mitra komersial bahwa mereka dapat bekerja dengan operator kemanusiaan tanpa takut melanggar sanksi," kata Guterres Kamis (27/1).

Guterres mencatat bahwa DK dengan 15 anggota pada bulan lalu mengadopsi pengecualian kemanusiaan terhadap sanksi PBB yang terkait dengan Afghanistan. Sekitar 9,5 miliar dolar AS cadangan bank sentral Afghanistan tetap diblokir di luar negeri dan dukungan pembangunan internasional telah mengering sejak Taliban mere-

but kekuasaan pada Agustus.

Para donor berusaha menggunakan uang itu sebagai pengaruh atas Taliban dalam masalah-masalah termasuk hak asasi manusia. "Ada bukti kuat dari lingkungan intimidasi yang muncul dan penurunan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa konsolidasi otoritas pemerintah mungkin mengarah pada pengendalian populasi oleh ketakutan," ujar utusan khusus PBB untuk Afghanistan Deborah Lyons kepada DK PBB.

Pada Desember, para donor untuk Dana Perwalian Rekonstruksi Afghanistan yang dikelola oleh Bank Dunia setuju untuk mentransfer 280 juta dolar AS ke Program Pangan Dunia dan badan anak-anak PBB UNICEF untuk mendukung nutrisi dan kesehatan di Afghanistan. Guterres mengatakan sisa 1,2 miliar dolar AS dana yang dibutuhkan akan segera dibebaskan untuk membantu rakyat Afghanistan bertahan hidup di musim dingin.

Duta Besar AS untuk PBB

Linda Thomas-Greenfield mengatakan kepada DK PBB, bahwa AS telah bergerak untuk memastikan sanksi tidak menghambat kegiatan kemanusiaan. Washington pun sedang memeriksa berbagai opsi untuk meredakan krisis likuiditas.

Direktur operasi Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Dominik Stillhart mengatakan, diskusi intens antara PBB, ICRC, Bank Dunia dan negara-negara donor utama dipusatkan pada fasilitas pertukaran kemanusiaan. Program ini akan didukung atau dikelola oleh Bank Dunia, serta memungkinkan untuk uang tunai untuk disuntikkan ke dalam ekonomi Afghanistan.

Menurut Stillhart uang dapat disimpan di fasilitas itu. Dalam kondisi tertentu uang tunai dapat disediakan untuk para pedagang di Afghanistan, meskipun menurutnya, itu adalah tindakan sementara. "Harus bank sentral yang harus memiliki kapasitas untuk menjalankan

fungsi-fungsi ini," katanya.

Stillhart mengatakan kesepakatan diperlukan antara PBB, Bank Dunia dan donor utama untuk memulai fasilitas ini. Dia mencatat bahwa diskusi itu tidak terkait dengan pencairan aset Afghanistan atau perubahan sanksi terhadap Taliban.

Menurut Stillhart, ide terpisah juga sedang dibahas yang akan melibatkan penggunaan uang dari Dana Perwalian Rekonstruksi Afghanistan yang dikelola Bank Dunia. Dana ini untuk membayar pegawai sektor publik non-keamanan.

PBB awal bulan ini telah meminta bantuan kemanusiaan sebesar 4,4 miliar dolar AS untuk Afghanistan tahun 2022. PBB mengatakan membutuhkan tambahan 3,6 miliar dolar AS untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, promosi mata pencaharian, dan kohesi sosial, khususnya kebutuhan perempuan dan anak perempuan. ● tom

Korut Kembali Uji Coba Rudal

SEOUL (IM) - Korea Utara menembakkan dua proyektil yang diduga sebagai rudal balistik jarak pendek ke laut lepas pantai timur, menurut militer Korea Selatan pada Kamis (27/1). Ini merupakan uji coba rudal keenam yang dilakukan negara itu dalam jangka waktu satu bulan.

Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS) mengatakan telah mendeteksi peluncuran yang diduga sebagai dua rudal balistik sekira pukul 8 pagi waktu setempat dari dekat Hamhung, di pantai timur Korea Utara. Rudal-rudal itu melesat sejauh sekira 190 km ke ketinggian maksimum 20 km, JCS menambahkan.

Rudal yang dicurigai tampaknya telah mendarat di luar zona ekonomi eksklusif Jepang, kata Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi sebagaimana dilansir Reuters.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan pemerintah masih mengumpulkan rincian tentang peluncuran itu, tetapi setiap uji coba rudal balistik "sangat disesalkan" dan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Korea Utara bulan ini mengatakan akan memperkuat perahannya terhadap Amerika Serikat (AS) dan mempersembahkan untuk melanjutkan "semua kegiatan yang ditangguhkan sementara", sebuah referensi yang jelas untuk moratorium uji coba senjata nuklir dan rudal jarak jauh yang diberlakukan sendiri oleh Pyongyang.

Pada Selasa (25/1), Korea Utara menembakkan dua rudal jelajah ke laut di lepas pantai timur, peluncuran kelima di tengah meningkatnya ketegangan atas serangkaian uji coba senjata baru-baru ini.

Awal bulan ini Korea Utara menguji coba peluru kendali taktis, dua "rudal hipersonik" yang mampu kecepatan tinggi dan bermanuver setelah lepas landas, dan sistem peluru kendali yang dibawa kereta api.

Dalam pidatonya di Konferensi Perencanaan Senjata yang disponsori PBB pada Selasa, Duta Besar Korea Utara untuk

PBB di Jenewa, Han Tae Song, menuduh Amerika Serikat melakukan ratusan "latihan perang bersama" sambil mengirimkan peralatan militer ofensif berteknologi tinggi ke Korea Selatan, dan senjata strategis nuklir ke kawasan Semenanjung Korea. "(Ini) sangat mengancam keamanan negara kita," kata Han.

Serangkaian uji coba rudal yang telah dilakukan Korea Utara telah menuai kecaman dari pemerintah di Amerika Serikat dan Jepang dan memicu pertemuan Dewan Keamanan PBB, yang telah memberikan sanksi kepada Korea Utara karena melanggar resolusi yang melarang uji coba rudal balistik.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden memberikan sanksi kepada beberapa individu dan entitas Korea Utara dan Rusia bulan ini atas tuduhan mereka membantu program senjata Korea Utara, tetapi China dan Rusia menunda upaya AS untuk menajutkan sanksi PBB pada lima warga Korea Utara.

Korea Utara telah membenarkan uji coba rudalnya, mengatakan bahwa tindakan itu adalah hak kedaulatannya untuk membela diri. Pyongyang mengatakan sanksi AS membuktikan bahwa bahkan ketika Washington mengusulkan pembicaraan, ia mempertahankan kebijakan "bermusuhan" terhadap Pyongyang.

"Uji coba senjata jenis baru baru-baru ini adalah bagian dari kegiatan untuk melaksanakan rencana jangka menengah dan panjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan nasional," kata Han dalam pidatonya, Selasa.

"Dan itu tidak menimbulkan ancaman atau kerusakan pada keamanan negara-negara tetangga dan kawasan."

Korea Utara belum meluncurkan rudal balistik antarbenua (ICBM) jarak jauh atau menguji senjata nuklir sejak 2017, tetapi mulai menguji sejumlah rudal jarak pendek setelah pembicaraan denuklirisasi terhenti setelah pertemuan puncak yang gagal dengan Amerika Serikat pada 2019. ● gul

Dijual saat Lahir dan Ditolak Orang Tua saat Bertemu, Seorang Remaja di Tiongkok Bunuh Diri

BEIJING (IM)- Seorang remaja Tiongkok bunuh diri setelah orang tua kandungnya menolak kehadirannya dalam dua kesempatan. Pertama, dia dijual saat lahir dan kemudian dia ditolak kehadirannya saat berhasil menemukan orang tuanya.

Liu Xuezhou (17/1), seorang calon guru, dinyatakan meninggal pada Senin pagi lalu di sebuah rumah sakit di Sanya, Tiongkok.

Sebelum bunuh diri, dia mengklaim dalam catatan panjang di Weibo Twitter versi China bahwa dia telah "ditinggalkan dua kali" oleh ibu dan ayah kandungnya. Kematian tragis remaja itu dilaporkan surat kabar South China Morning Post, Kamis (27/1).

Dia telah bekerja sebagai guru magang ketika dia meluncurkan pencarian orang tua kandungnya. Aksi pencarian itu telah viral. Dia melakukan pencarian orang tua kandung, yang menurut keluarga angkatnya, telah menjualnya setelah dilahirkan seharga USD4.200.

Sebagian besar uang itu dikmati perantara. Liu, bagaimana-

pun, menghabiskan sebagian besar hidupnya di antara kerabat angkatnya. Itu terjadi setelah rumah yang dia tinggali hancur akibat ledakan dan menewaskan orang tua barunya.

Setelah membuat video tentang harapannya untuk bersatu kembali dengan orang tua kandung, pihak berwenang mendorongnya untuk menggunakan database DNA yang dibuat untuk mengekang perdagangan anak dan menyatukan kembali keluarga. Reuni itu pada awalnya beresahabat, tetapi hubungannya dengan orang tua kandung dilaporkan menjadi tegang karena klaim bahwa dia telah dijual, bukan diberikan. Ibu kandungnya, yang diidentifikasi hanya dengan nama keluarganya, Zhang, mengatakan dia akhirnya menolak kehadiran anaknya itu karena dia ingin kehidupannya yang sekarang tenang.

"Orang tua juga manusia, dan saya merasa takut," kata Zhang kepada Beijing News, seraya menambahkan bahwa dia telah dilecehkan dan dian-

cam setelah putranya merilis rekaman salah satu panggilan telepon mereka.

Dia juga mengungkapkan bahwa dia diintimidasi dan dilecehkan di sekolah. Tubuh Liu ditemukan di sebuah pantai di provinsi pulau Hainan, Tiongkok selatan, oleh orang-orang yang mulai mencarinya setelah membaca posting media sosialnya. Namun, kematiannya diumumkan secara resmi oleh pihak rumah sakit.

Kematian Liu dikonfirmasi oleh otoritas Tiongkok, memicu percakapan nasional tentang cyber-bullying dan kesehatan mental anak-anak, terutama mereka yang telah ditinggalkan. Tanda pagar kampanye telah dilihat 2,4 miliar kali di Weibo pada Selasa malam.

"Kasusnya mencerminkan kenyataan bagi kelas bawah," bunyi komentar akun Slave Society dalam posting di WeChat.

"Itu mulai dari perdagangan anak hingga kehilangan walinya, intimidasi sekolah, pelecehan, intimidasi dunia maya hingga bunuh diri," lanjut posting tersebut. ● ans



JELANG OLIMPIADE MUSIM DINGIN BEIJING 2022

Cincin Olimpiade difoto di Pusat Pers Utama menjelang Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 di Beijing, Tiongkok, Kamis (27/1).

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH INDEKS SYAILENDRA SHARIA INDEX JII

PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYARIAH INDEKS SYAILENDRA SHARIA INDEX JII dengan ini mengumumkan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH INDEKS SYAILENDRA SHARIA INDEX JII sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

- perubahan ketentuan Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan yang semula "batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah)" menjadi "batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)";
- perubahan ketentuan Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang semula "Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk setiap transaksi" menjadi "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi";
- perubahan ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang semula "Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)" menjadi "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) pada hari dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan";
- perubahan ketentuan Batas Minimum Pengalihan Investasi yang semula "Rp 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) untuk setiap transaksi" menjadi "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi"; dan
- perubahan ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang semula "sama dengan besarnya saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan pada Reksa Dana yang bersangkutan" menjadi "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) pada hari dilakukannya pengalihan investasi".

Untuk informasi lebih lanjut mengenai rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH INDEKS SYAILENDRA SHARIA INDEX JII serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA Jakarta, 28 Januari 2022
Manajer Investasi
PT Syailendra Capital
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan